



## Raperda PBG Tingkatkan Retribusi Daerah

PONTIANAK, SP - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pendapat akhirnya terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Keempat Raperda tersebut di antaranya tentang Persewaan Bangunan Gedung (PBG), ketenagakerjaan, Smart City dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Edi menyebut, masing-masing Raperda diharapkan meningkatkan kualitas pembangunan di Pontianak.

"Retribusi PBG itu dalam rangka Undang-Undang Cipta Kerja, yang tadinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG. Supaya ada pemasukan untuk daerah," jelasnya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pontianak, Selasa (17/5).

Edi memaparkan, beberapa peraturan dibuat tak hanya mengatur upah minimum saja, seperti Raperda tentang ketenagakerjaan. Dia menerangkan,

• Baca Halaman 11



PENGESAHAN - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono bersama pimpinan DPRD Pontianak foto menandatangani pengesahan Raperda PBG menjadi Perda.

kan, hubungan antar pekerja maupun kepada pihak pengguna jasa juga harus dikuatkan dalam Raperda itu. Selain itu, perlunya payung hukum Pontianak Smart City untuk memudahkan pelaksanaannya secara teknis.

"Kemudian penataan dan pemberdayaan PKL. Selaku kota jasa dan perdagangan, kita harapkan masyarakat bisa berjiwa entrepreneur namun juga menjadi bagian pembangunan Kota Pontianak," ungkap dia.

Dengan disetujuinya empat Raperda tersebut, tentunya akan jadi landasan

bagi aparat daerah dalam melayani masyarakat. Lebih lagi, Edi berharap, Raperda tersebut dapat mendorong masyarakat khususnya pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Pontianak.

"Empat buah Raperda ini sangat penting sebagai bahan dalam pelaksanaan secara teknis," tutupnya.

Ketua DPRD Pontianak, Satarudin menambahkan, pihaknya bekerja maksimal untuk menciptakan Raperda ini. Menurut dia, hal itu dilakukan demi kepentingan masyarakat Pontianak.

"Apalagi Raperda PBG itu sangat penting. Dengan adanya Raperda ini, bisa menarik retribusi," ucap dia.

Dia meminta Pemkot Pontianak untuk menyiapkan Peraturan Walikota (Perwa) yang berkaitan dengan Raperda tersebut. Meski dalam perjalanannya, lanjut Satarudin, perancangan Perda ini akan melalui tahap evaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur Kalimantan Barat, sebelum akhirnya disahkan. "Kalau pun nanti ditemukan masalah, maka kita akan diskusi lagi," pungkasnya. (din)